

PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA MANADO 2020

Frandy Edo Mukuan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

Coressponding author:

edomukuan73@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan pemilih pemula sangat penting pada proses pemilihan umum. Jumlah mereka cukup signifikan, sekaligus merupakan generasi penerus dari bangsa Indonesia. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan kebanyakan cenderung apatis, akibat dari pemahaman politiknya yang masih kurang. Mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, ruang keluarga. Artikel ini akan mengkaji perilaku politik pemilih pemula di Kecamatan Sario pada pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan sebagian besar pemilih pemula di Kecamatan Sario menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Artinya perilaku pemilih pemula kecamatan Sario dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilukada Manado 2020 yakni mereka memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih

ABSTRACT

The presence of novice voters is very important in the general election process. Their number is quite significant, as well as being the next generation of the Indonesian nation. The behavior of novice voters has characteristics that are usually still unstable and most tend to be apathetic, as a result of their lack of political understanding. They have just studied politics, especially in general elections, the spaces where they study politics are usually not far from the space that is considered to give them a sense of comfort. as for the spaces where politics is studied, namely, the family room. This article will examine the political behavior of novice voters in Sario District in the 2020 mayoral and deputy mayoral elections. The research findings describe that most of the novice voters in Sario District exhibit sociological voting behavior. This means that the behavior of the novice voters in the Sario sub-district in making their choice for a candidate in the 2020 Manado regional election, namely that they choose a candidate and make their choice influenced by their social background. Where the family has a big influence on the choice of novice voters to a candidate.

Keywords: Voter Behavior

PENDAHULUAN

Perilaku merupakan suatu tindakan yang di buat oleh individu, dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya. Perilaku politik dapat dikatakan sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berkenan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang melakukan interaksi kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan itu pada dasarnya di bagi dalam fungsi-fungsi pemerintahan yang di pegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang di pegang oleh masyarakat. Namun fungsi pemerintah, maupun, fungsi politik, biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu supra struktur politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintah dan infrastruktur politik bagi fungsi-

fungsi politik masyarakat. Secara bebas perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi kongkriktanya telah saling memiliki hubungan.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pemahaman politiknya kurang, cenderung masih mengikuti orangtua, teman, media massa media elektronik, poster, baliho, dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling berpengaruh pada pemilih pemula itu adalah orangtua mereka, sementara pengaruh pada teman, media massa, media elektronik, poster, baliho belum begitu besar pada kelompok ini. Mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, ruang keluarga.

Didalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada disekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertama kali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orangtua bisa membentuk perilaku pemilih mereka yang pemula. Pengaruh teman, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi presepsi dan tindakan positif tetapi juga dapat mempengaruhi presepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi bahwa suatu hal tersebut adalah sama baik itu sifatnya, tingkah lakunya dan karakteristiknya dengan perilaku politik teman dekatnya.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut adil dalam menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa yang akan datang karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar dan baik dari suprastruktur politik maupun infrastuktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih pemula akan turut menentukan arah pemerintahan yang baru serta kritis dalam menentukan pemimpin di manado.

Pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Pemilu seringkali di sangkut pautkan dengan pesta demokrasi, ketika semua rakyat dari berbagai lapisan dan struktur sosial berbondong-bondong baik secara personal maupun komunal (partai) turut serta dalam menentukan pemimpin. Ada suatu hal yang menarik jika membahas mengenai partisipasi politik dan perilaku pemilih itu sendiri dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Dalam penelitian yang saya lakukan mengenai perilaku politik masyarakat, setidaknya hal ini ingin menggambarkan dan mendeskripsikan sedikit hal mengenai perilaku politik masyarakat dalam memilih pemimpin yang mereka pilih.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi Menurut paham demokrasi, peran dari masyarakat sangatlah luas dibutuhkan. Peran dari masyarakat inilah yang nantinya dibutuhkan untuk membentuk negara menjadi lebih baik. Peran aktif dari masyarakat selain memilih dalam pemilihan, adalah mengawasi pemilihan serta ikut mensosialisasikan pemilu pada masyarakat awam supaya pemilu berjalan luber dan jurdil.

Pemilihan umum digunakan rakyat untuk memilih pemimpin yang baik dan jujur sekaligus suara rakyat. Namun pada pelaksanaannya seringkali rakyat di bingungkan untuk menentukan pilihannya, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan tim sukses calon kepala daerah walikota manado dengan memberikan imbalan kepada rakyat.

Sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa suara yang dihasilkan pada pemilu bukan benar-benar suara rakyat. Disinilah peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu sangatlah penting harus dimaksimalkan, dengan gencar melakukan sosialisasi terutama bagi pemilih pemula. Karena kelompok tersebut kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dari proses penyelenggaraan pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat yang menentukannya dan Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum Negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan Ketika terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang adil dan berkala, pertanggungjawaban Negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan pemilukada). Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya. Namun, ketidakadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Pemilih pemula sekarang ini masih banyak tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena sebagian pemilih pemula tidak peduli dengan dilaksanakannya pemilihan umum tersebut.

Dalam uraian latar belakang diatas penulis melihat ada beberapa permasalahan perilaku politik pemilih pemula yang ada di Kecamatan Sario Kota Manado. Dengan masih adanya pengaruh ajakan keluarga yang sangat tinggi dan pengaruh temannya, sehingga dapat menghasut perilaku politik pemilih pemula untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang akan dipilih oleh keluarganya atau temannya, dapat terhasut atau terpengaruh dengan ajakan orangtuanya dan tidak memilih apa yang akan dipilih oleh pemilih pemula serta Sebagian pemilih pemula masih ada sikap apatis yang muncul karena tidak adanya pilihan dari calon kandidat yang disebabkan oleh ketidakjelasan program yang dimiliki sehingga mereka enggan untuk menentukan pilihan mereka pun menganggap program tersebut kurang rasional, pasangan calon yang terdiri dari empat kubu membuat pemilih pemula menjadi terbelah dan membuat memanasnya situasi perpolitikan di kecamatan sario kota manado, keterbatasan pengetahuan dan rendahnya Pendidikan atau pengetahuan politik kemudian lemahnya pengetahuan pemilih pemula terhadap pemilihan umum kepala daerah di manado, membuat mereka mudah terpengaruh dengan berita dan hoax politik tanpa mengetahui kebenarannya, sehingga membuat pemilih pemula tidak objektif dalam menentukan pilihannya.

Pemilihan serentak Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado 2020 ini adalah salah satu pemilihan yang lain dari pada yang lain karena adanya pandemi virus corona, dimana dampak dari Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada keberhasilan suatu Demokrasi, yaitu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemerintah melalui penyelenggara pemilihan umum telah menghimbau kepada masyarakat untuk jangan takut datang ke TPS dengan mengikuti Protokol Kesehatan. Seperti yang diketahui penyakit ini sangat berbahaya dan mengancam kesehatan seseorang, Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat karena berpotensi masalah pada partisipasi politik yang disebabkan oleh adanya pandemi saat ini. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2020, terdiri dari 11 Kecamatan dan Salah satunya Kecamatan Sario, 7 Kelurahan dan terdiri dari 52 TPS, DPT sebanyak 16.381 orang, laki-laki 7.958 orang, perempuan 8.423 orang. Dan terdapat 10 partai politik yang terlibat dalam pilkada walikota dan wakil walikota ini. Dalam pemilihan pada masa pandemi dengan adanya peraturan tentang waktu yang sangat dibatasi, pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi yang di anggap tidak mungkin dilaksanakan namun tetap terlaksana pada Rabu 9 Desember 2020. Dan disertai antusias masyarakat yang datang ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah. Dampak yang terjadi pada pemilihan ini disebabkan dari pandemi Corona Virus-19 ini sehingga berdampak pada suatu tingkat partisipasi politik Walaupun pada masa pandemi saat ini.

Keterlibatan pemilih pemula di kecamatan Sario kota Manado dalam PILKADA dapat dikatakan sebagai sebuah partisipasi politik. Kemudian dalam partisipasinya itu kita akan melihat perilaku memilih seperti apa yang terdapat di kecamatan sario kota manado. Baik pada saat kampanye berlangsung ataupun pada saat pemberian suara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih (*Voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000), voting adalah: "Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya".

Ada dua macam teori voting behaviour yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar. Pertama, pendekatan Voting dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh Colombia's university Bureau of Applied Social Science . Kedua, pendekatan voting dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Centre (Gaffar, 1992:4-9). Menurut Muluk (2012) kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seorang warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar sebagai pemilih untuk melakukan pencoblosan melalui surat suara.

Susanto (1992) mengartikan *voting behavior* adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilu, seperti menunaikan, kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.

Hubungan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam pemilu menurut Asvi Warman (1999), dijelaskan paling sedikit ada dua model yang menjelaskan mengapa orang memilih sebuah partai. Pertama pendekatan sosiologis dan Psikologis.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku dari setiap individu sangatlah unik, karena terjadi perbedaan dalam menentukan setiap tindakannya. Dalam menentukan perilakunya individu melibatkan beberapa hal yang diantaranya: kognitif seperti : persepsi, perhatian, motivasi, minat dll, dan psikomotorik atau anggota tubuh seperti: otak, kaki, telinga, mata.

Sementara dalam konteks perpolitikan, perilaku yang dikategorikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya merupakan sebuah bentuk konsep yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara aktif maupun secara pasif. Konsep perilaku tersebut bisa berupa partisipasi politik. Lebih jauh lagi bahwasanya konsep perilaku merupakan sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya.

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksekutif maupun inklusif. Memilih merupakan aktifitas untuk menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan , yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Kaitanya dengan definisi tersebut bahwasanya dalam hal memilih individu setidaknya akan melibatkan 2 hal, diantaranya; pikiran dan perasaan. Pertama, proses penerimaan informasi, pemahaman terhadap informasi, dan penyikapan atau respon terhadap sebuah informasi merupakan sebuah hal pikiran yang menunjukkan individu dalam memutuskan sebuah pilihan.

Dalam hal ini memilih juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas informasi atau objek pilihannya, artinya seberapa jauh informasi atau objek pilihan mempengaruhi pikiran individu tersebut untuk menentukan pilihannya (misalnya; seberapa penting dan menguntungkan pilihan tersebut), serta intensitas informasi, artinya seberapa lama informasi tersebut berada dibenak pikiran individu. Kedua, adalah perasaan, artinya proses memilih ini berhubungan dengan kecocokan atau ketidak cocokan terhadap objek pilihannya. Perasaan ini bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung mood seseorang, saat dimana kondisi sedang baik (bahagia, senang ataupun ceria) maka baik pula pilihannya. Jika seseorang pada kondisi tidak baik (marah, benci, sedih), maka buruk pula pilihannya.

Perilaku memilih secara sederhana bisa didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat atau partai politik tertentu baik dalam pemilihan anggota Legislatif maupun Eksekutif. Dinyatakan sebagai Pemilih dalam Pemilu yaitu mereka yang terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendataan peserta pemilih.

Adapun Perilaku Pemilih menurut Surbakti adalah "aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih

(*to vote or not vote*) dalam suatu Pemilihan umum. Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Adapun bentuk-bentuk perilaku pemilih yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam kampanye, serta keikutsertaan masyarakat dalam partai politik dan juga puncaknya dalam keikutsertaan dalam pemungutan suara (*Vote*).

Komunikasi Politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik yang amat penting, dan juga menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Melalui komunikasi politik rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik (Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun).

Dalam komunikasi Politik kampanye diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan pertanggungjawaban terhadap program-program yang ditawarkan oleh calon. Sebagai pendidikan politik kampanye mengandung penguatan rasionalitas dan kritisisme pemilih. Dan melalui kampanye kita dapat melihat apakah masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan kampanye tersebut, karena dalam ikut dalam pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik.

Peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu antara lain:

- a. Komunikasi Politik contohnya melaksanakan kampanye
- b. Pendidikan Politik dalam hal ini mampu memeberikan arahan untuk ikut serta memberikan suara(*vote*)
- c. Sosialisasi Tentang Pemilu yang menjelaskan untuk apa dan mengapa diadakan pemilu.
- d. Fungsi Rekrutmen Politik

Puncak pemungutan suara (*Vote*). Disini dapat dilihat seberapa besar masyarakat yang benar ikut ambil bagian dalam Pemilu yang dilaksanakan.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin yang menjadi dukungannya. Begitupun sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal atau konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku memilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik ataupun kontestan pemilu. Masing-masing kontestan tentunya membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul pula pengelompokan ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideology sama dengan yang mereka menganut sekaligus menjauhi ideology yang bertentangan dengan mereka.

Dalam pengambilan keputusannya, maka masyarakat diperkirakan mempunyai tolak ukur yang tradisional yang meliputi tiga aspek penting.

- Identifikasi terhadap partai.
- Isu yang diusung partai atau calon dan
- Penampilan dan kepribadian calon

Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh (1983:10) *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dalam tiga pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan menjelaskan perilaku pemilih masyarakat inggris, menyebutkan model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti, pekerjaan, pendidikan,) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur,) merupakan faktor penting dalam menentukan sebuah pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur (tua/muda), jenis kelamin (lelaki/perempuan), agama dan *sebagainya* dianggap mempunyai peranan yang cukup untuk menentukan dalam membentuk

pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya yang merupakan suatu yang vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok ilmiah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

b) Pendekatan Psikologis

Bila pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat dan berasal dari Eropa Barat, maka pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut Mazhab Michigan.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variable-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Penganut paham psikologi ini menjelaskan sikap seorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variable yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Maka dari itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

c) Pendekatan pilihan Rasional

Pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos kecil-kecilan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, biasa jadi pemilih tidak akan memberikan hak suaranya pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, dimana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatkannya kelak. Maka jalan terbaik yang diambil pemilih adalah dengan melakukan kegiatan atau aktivitas keseharian.

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih untuk memilih.

Adapun jenis-jenis Pemilih sebagai berikut:

a. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan segala program kerjanya, mereka dapat melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan di masa lampau, dan tawaran program yang di berikan para calon atau parpol dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih jenis ini memiliki ciri khasnya yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seseorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh partai ataupun kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu di mana mereka akan berpihak dan kemudian akan mengkritisi kebijakan yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh partai atau kontestan pemilu lalu kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini

adalah pemilih yang kritis artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideology partai dan kebijakan yang akan dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, jilid, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih partai politik dan kontestan pemilu, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Secara

umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surabakti, 1992:131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik dan kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku ada tiga unit analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang tercakup dalam aktivis politik dan individu warga negara biasa. Menurut Mahendra (2005: 36) menjelaskan bahwa kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :

- a. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga Negara biasa).
- b. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
- c. Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, Machiavelist, dan Demokrat). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa)

Sedangkan agregasi maksudnya adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Dengan mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut diatas akan dihasilkan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluaraga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, ancaman dalam segala bentuknya (Surbakti, 199:133).

Menurut Abdul Munir Mulkam perilaku politik merupakan tindakan yang lahir dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Mukti Sitompul, 2004), Perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Struktural
- b. Pendekatan Sosiologi atau Sosial Struktural
- c. Pendekatan Ekologis
- d. Pendekatan Psikologis
- e. Pendekatan Rasional

Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari perilaku politik tertentu.

B. Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (Pahmi, 2010 : 54) pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah :

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih sudah/pernah kawin
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih
- d. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian)
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Terdaftar di DPT
- g. Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan di daerah yang bersangkutan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 yang telah menyebutkan warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Pengertian di atas tersebut, maka karakteristik pemilih pemula berbeda dengan karakteristik pemilih yang sudah pernah terlibat dalam pemilu sebelumnya seperti apa yang diungkapkan Setiajid (2011:20) yaitu :

- a. Belum pernah memilih atau melakukan suara di dalam TPS
- b. Belum memiliki pengalaman memilih
- c. Memiliki antusias yang tinggi
- d. Kurang rasional
- e. Pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu
- f. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar
- g. Memiliki rasa ingin tau, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Menurut Setiajid (2011:20-21) juga mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategi dalam pemilihan umum adalah :

- a. Alasan kuantitatif yaitu bahwa pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum
- b. Pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit diatur atau diprediksi
- c. kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan tidak memilih sama sekali
- d. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Secara kuantitatif pemilih pemula merupakan peluang politik yang dapat diraih oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan. Perkembangan yang meningkat secara jumlah yang terus berubah dari tiap pemilihan umum menunjukkan bahwa pemilih pemula sebagai asset yang berharga, sentral, dan strategis.

C. Pemilukada

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditunjukkan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia.

Pemilukada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena Pemilukada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan Pemilukada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dey*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi

Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi local dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan Pemilukada secara langsung yang selama tahun 2005 melibatkan 16 pemda Propinsi dan 118 pemda Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada tersebut, maka akan menjadi sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga tahun 2005 kemarin bisa dijadikan tonggak demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 kemarin terdapat 244 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah, terdiri atas lebih dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota.³⁸Akan sangat disayangkan ketika dalam pelaksanaan di 224 pemerintahan daerah itu terjadi konflik atau permasalahan yang akan merusak dan berakibat fatal pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistim pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di eliminasi.

Pemilihan Kepala Daerah diatur oleh undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 61 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Dan Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Penyelenggaraan Pemilukada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD.

Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.

Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah yang bersangkutan atau 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut⁴². Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 memenuhi syarat disebut sebagai Pemilu langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Pemilu langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila Pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola Daerah. Sekaligus Kepala Daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Secara umum Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.

Menurut Supriyanto (2008:27) *peraturan pemilihan kepala daerah*, menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dimana persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD atau dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu dalam melalui jalur perseorangan (non-partisipan). Tahapan dalam pelaksanaan pemilu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendaftaran pemilih calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik
4. Pengadaan kampanye
5. Pemungutan dan perhitungan suara
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah).

Tahapan dalam pelaksanaan pemilu telah diatur secara jelas didalam UU lama nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2005 serta selalu mengalami penyempurnaan dan perubahan untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang aman, tertib dan lancar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, (Sujarweni, 2014:6), dengan fokus penelitian pada Perilaku Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Sario Kota Manado yang dianalisis

menggunakan teori dari Dennis Kanvanagh (dalam Mukti Sitompul, 2004). Menurutnya perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis adalah proses memilih yang dilakukan pemilih pemula berdasarkan latar belakang demografi dan ekonomi sosial seperti jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan agama.
2. Pendekatan Psikologis adalah ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya seperti figur kandidat dan ikatan emosional terhadap kandidat atau calon.
3. Pendekatan pilihan Rasional yakni proses memilih pada pertimbangan untung dan rugi dimana pemilih melihat pilihan rasional yang paling menguntungkan untuk dirinya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikaji melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Pemilih Pemula Kecamatan Sario

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti akan membahas berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dennis Kanvanagh (dalam Mukti Sitompul, 2004), yang mengartakan bahwa perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan pendekatan yaitu :

- **Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Dimana pilihan seseorang dalam pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan agama. Untuk memberikan gambaran terhadap perilaku politik pemilih dengan menggunakan pendekatan sosiologis dapat diketahui bahwa pemilih pemula pada awalnya pasti masih kurang pemahaman dan masih merasa gugup akan pemilihan kepala daerah karena tergolong pemula dan masih tidak terlalu antusias akan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Walikota, dilihat dari perilaku pemilih pemula tersebut menentukan pilihannya dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang tergolong memandang latar belakang demografi, ekonomi, sosial serta jenis kelamin pekerjaan dan tempat tinggal. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku politik pemilih pemula dapat dipengaruhi dengan latar belakang ekonomi sosial dan asal calon Walikota dalam pemilihan kepala daerah ini.

hasil wawancara diatas dengan para informan pemilih pemula bahwa lebih dominan pemilih pemula yang memilih dengan pendekatan sosiologis, dapat disimpulkan dengan perilaku politik pemilih pemula yang masih sangat awam akan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Walikota sehingga kurangnya rasa ingin menggali lebih dalam tentang para calon Walikota sehingga dengan dorongan para orang tua dan semangat antusiasme sehingga mereka memilih dilatar belakang oleh faktor pendekatan sosiologis yang melihat latar belakang para pasangan calon Walikota yang meliputi demografi dan sosial ekonomi seperti pekerjaan, Pendidikan, dan tempat tinggal.

Hal ini dapat dilihat bahwa faktor perilaku pemilih pemula menentukan pilihannya memiliki kecenderungan melihat asal dari calon Walikota tersebut dan melihat pekerjaan serta jabatan yang diembannya sebagai faktor penentu pilihan oleh pemilih pemula, sehingga pemilih pemula lebih tertarik dengan latar belakang para calon Walikota ketimbang melihat visi dan misi para calon Walikota.

Menurut penulis perilaku politik pemilih pemula di kecamatan Sario ini mudah di intimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orang tua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu tema dan kandidat, teman, dll. Lebih lanjut menurut penulis bahwa adanya pemilih pemula yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di

kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilukada. Akibatnya mereka kurang terlibat dalam pemilihan seperti mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh pihak KPU atau anggota partai yang mencalonkan diri. Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik yang terjadi.

- **Pendekatan Psikologis**

Pendekatan Psikologis Sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain. Untuk memberikan gambaran terhadap perilaku pemilih dengan menggunakan pendekatan psikologis pemilih pemula dapat diketahui bahwa perilaku politik pemilih pemula dengan kecenderungan pendekatan psikologis yang menentukan pilihannya karena melihat sebagaimana partai tersebut dirasakan sangat dekat dan memiliki rasa pamrih karena merasa memiliki kewajiban untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh salah satu partai tersebut baik secara kehadiran yang sering hadir dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dikecamatan tersebut sehingga dapat menarik minat para masyarakat ataupun pemilih pemula dikecamatan tersebut. Sebagaimana dengan partai yang sering ikut serta dalam kegiatan dalam kecamatan tersebut sehingga menimbulkan dampak secara langsung bagi calon Walikota yang diusungnya karena bentuk dukungan itu secara tidak langsung tersalurkan melalui partai tersebut, walaupun pemilih pemula tersebut tidak begitu mengenal calon Walikota tersebut.

hasil wawancara dari informan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku politik pemilih pemula dapat dipengaruhi oleh kerja dan rasa kedekatan oleh partai pengusung disuatu daerah sehingga dapat dilihat bahwa perannya oleh partai politik dalam menarik minat dan antusiasme para pemilih pemula berbeda dengan pendekatan pilihan rasional yang sangat teliti akan menentukan pilihannya dari kebutuhan pribadinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh partai politik atau iming-iming lainnya dari para kader partai tersebut.

hal ini sangatlah wajar karena dititik tertentu partai pastinya memiliki simpatisan dan sangat sulit untuk ditaklukkan oleh partai lain yang berusaha mendulang suara ditempat tersebut, sehingga mulai dari orang tua sampai pemilih muda serta pemilih pemula memiliki loyalitas tinggi terhadap partai tersebut walaupun tidak terlalu mengenal calon Walikota yang diusungnya karena kinerja dari partai dan kader yang membuat partai tersebut memiliki loyalitas tinggi dari para pendukungnya

menurut penulis, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis, seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

- **Pendekatan Pilihan Rasional**

Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi. Untuk memberikan gambaran terhadap perilaku pemilih dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional maka dapat diketahui bahwa perilaku politik pemilih pemula tersebut sangat rasional karena memperhatikan keuntungan bagi masyarakat kota Manado dengan melihat apa visi dan misi calon Walikota yang mungkin mereka lihat atau dengar dengan melihat proses debat yang dilakukan para calon Walikota seperti ditelivisi maupun dimedia sosial, dari sini dapat disimpulkan bahwa minat para pemilih pemula dapat diperoleh oleh visi dan misi yang dijabarkan para calon Walikota sehingga menjadi pengantar bagi keikutsertaan para pemilih pemula bagi pemilihan umum kepala daerah khususnya pemilihan Walikota ini. Pemilih pemula tersebut melihat bahwa visi dan misinya tersebut memiliki dampak atau manfaat bagi kota Manado nantinya khususnya para masyarakat yang akan memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari jika calon Walikota tersebut terpilih.

hasil wawancara diatas dengan para informan pemilih pemula dapat diketahui bahwa para pemilih pemula memiliki kepekaan akan dampak yang akan diperoleh nantinya jika memilih salah satu calon Walikota melihat dari apa yang dijanjikan atau visi dan misinya jika

suatu saat terpilih berbeda dengan pendekatan sosiologis yang hanya melihat latar belakang calon Walikota tanpa melihat visi dan misi yang akan memberikan dampak dikemudian hari jika salah satu calon Walikota terpilih dan menjalankan visi misinya tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari cara pemilih pemula yang memilih calon Walikota dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional dengan melihat mana yang nantinya akan memberikan dampak bagi kota Manado pada umumnya dan terkhusus bagi dirinya atau anggota keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui pula bahwa pemilih pemula sudah mulai melihat dan memiliki kesadaran akan pentingnya memilih dan ikut serta dalam pemilihan umum dan melihat dengan jelas keuntungan yang akan diperoleh bagi kota Manado pada umumnya dan dirinya sendiri khususnya jika pasangan yang dipilih, terpilih dikemudian hari. Untuk itu pengaruh oleh visi dan misi atau apa yang dijanjikan oleh para calon Walikota sangat berpengaruh bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihan, baik itu karna niatan sendiri ataupun karna faktor dorongan orang tua mereka sendiri yang merupakan masyarakat kota Manado sehingga memilih berdasarkan dampak atau keuntungan yang diperoleh dikemudian hari.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilihan Walikota Manado 2020 (studi di Kecamatan Sario)

1. Faktor Keluarga dan faktor sikap Apatis pemilih

Kepatuhan anak terhadap orangtua lazim terjadi pada pemilih pemula kecamatan sario. hal tersebut menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya, sekalipun dalam lingkungan keluarga. Sama halnya dengan kepatuhan anak terhadap orangtua mereka. Pada faktor ini, seorang anak akan meyakini apapun keputusan dan pilihan dari orangtua mereka. Begitupun dalam hal menetapkan atau mejatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilihan. Pada pemilukada di kota Manado faktor ini juga melatar belakangi perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya terhadap seorang kandidat, Setiap pemilih hidup dalam koteks tertentu dimana status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih.

Prefensi politik atau kesamaan pilihan di lingkungan keluarga juga disebabkan karena adanya sikap Apatis pemilih. Apatis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sikap Acuh tidak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Apatis adalah sikap yang menolak dengan tegas keterlibatan pemilih pemula terjun dalam politik praktis semisal menjadi tim sukses. Namun tidak secara ekstrim menolak untuk tidak berpartisipasi, khususnya pada pemilukada. Bagi pemilih Apatis, keterlibatan atau partisipasi politik pemilih cukup diwujudkan dalam bentuk memilih kandidat yang ada untuk menjaga netralitas serta idealismenya.

2. Faktor Visi Misi Calon Walikota dan Faktor Money Politik

pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada pemilihan Walikota tahun 2020 adalah visi dan misi calon Walikota yang dapat menarik minat para pemilih pemula serta peran khusus yang dilakukan para orang tua mereka dalam memberikan arahan visi misi calon dan saran tentang bagaimana memilih calon yang layak untuk dipilih. Pemilih pemula biasanya mudah dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di televisi mengenai visi misi calon Walikota maupun media sosial baik itu pemberitaan yang baik maupun pemberitaan yang buruk, sehingga para pemilih pemula haruslah pintar dalam mencerna apa yang mereka lihat, dan disinilah muncul vsis misi calon pada pemilihan Walikota ini karena para pemilih pemula biasanya malas untuk mencari lebih jauh atau meneliti kebenaran yang mereka lihat dimedia sosial khususnya pemberitaan tentang segala macam berita hoax visi misi yang menjanjikan pada saat mereka terpilihnya nanti dan yang muncul pada saat menjelang pemilihan Walikota.

dengan adanya money politik yang seakan mengibaratkan bahwa uang adalah penentu suara pemilih pemula, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang paling umum yang dialami para pemilih pemula yang masih sangat minim pengalaman adalah bagaimana mereka menangkal money politik yang mereka lihat atau dengar dengan memegang prinsip demokrasi yang bersih dan memilah berita tersebut. Diperlukan sebuah keberanian dan keinginan tahanan akan kebenaran berita tersebut mengenai Money Politik. Oleh karena itu pemilih pemula

diharapkan lebih aktif akan dunia politik agar tidak mudah terhasut oleh Money Politik yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang merusak citra dan pandangan pemilih pemula terhadap salah satu calon Presiden sebagaimana yang didapati saat ini banyaknya berita sehingga kita sebagai pemilih yang memang kurang tahu akan kebenaran berita tersebut dapat berpikir bahwa berita tersebut benar, dan berdampak memperburuk pandangan pemilih yang memang sudah lebih dulu menentukan pilihan akan tetapi dapat berubah dengan adanya Money Poltik ini yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sario bahwa pemilih pemula yang mengikuti pemilihan umum khususnya pemilihan Walikota dapat disimpulkan bahwa:

- Dari sisi Pendekatan Sosiologis pemilihan kepala daerah di Kota Manado ikatan kekeluargaan juga berpengaruh untuk membentuk pilihan seseorang calon kepala daerah, apalagi kalau masih ada ikatan saudara dengan pasangan calon kepala daerah yang ada. Namun juga Persoalan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnik, usia, jenis kelamin dan agama menjadi faktor pendukung dalam melihat perilaku pemilih dilingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana status sosial itu membentuk pola pikir dalam bertindak. Seseorang atau pemilih yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk khususnya di Kota Manado termasuk pemilih yang terlibat dalam sebuah kelompok lembaga tertentu baik formal ataupun non formal akan mempengaruhi perilaku mereka.
- Dari sisi Pendekatan Psikologis, adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat. Keterlibatan aktor di balik layar membuat pemilih semakin yakin terhadap pilihannya. Karena dengan hadirnya sosok pemimpin yang mengikuti atau menyertai kandidat membuat nilai tambah buat kandidat.
- Dari sisi Pendekatan Pilihan Rasional ini sangat berpengaruh dalam sistim demokrasi di Indonesia. Sayangnya pendekatan rasional yang berkembang saat ini merupakan pendekatan rasional yang sifatnya negatif. Dimana rasionalitas cenderung memunculkan politik uang. Masyarakat pemilih tidak terkecuali para pemilih pemula sudah terkontaminasi akut dengan sistim rasional negative ini. Namun dari hasil wawancara dengan sebagian besar informan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat kecamatan Sario lebih rasional dalam menentukan pilihan, lebih spesifik rasional pada kemampuan calon dan track record mereka serta visi misi yang mereka miliki. Dalam prespektif politik rasional merupakan suatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi politiknya.
- Faktor perilaku politik pemilih pemula pada pemilihan Walikota Manado 2020 (studi di Kecamatan Sario) menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Perilaku pemilih pemula kecamatan Sario dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilukada Manado 2020 yakni Mereka memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Faktor ini didasari karena Dari semua informan yang berhasil diwawancarai hampir semua diantaranya memiliki preferensi pilihan yang sama dengan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daniel, S. Salossa. 2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pemilukada Langsung*. (Yogyakarta, Mediapresindo)
- Denis Kavanagh. 1983. *Political Science and Political Behaviour*. (London: Allen and Unwin,)
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung : CV. Alfabeta
- Haryanto. 2000. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta EGC.

Info Pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum.

<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/717106>

Lili Romli. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mukti Sitompul, 2005. Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu 2004 : Studi Kasus Pada Mahasiswa Fisip USU 2003. Jurnal USU.

Pahmi, S.Y. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Prihatmoko, J. Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rauf, Maswadi, dan Nasrun, Mappa. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Setiadjud, 2011, Orientasi Politik yang mempengaruhi Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang).

Sujarweni,V.W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. A. Muri Yusuf.

Supriyanto, SH,MH. 2008. *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta : Pustaka mina.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Yuliansyah Fathoni , 2017. Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Legislatif 2014 : Studi kasus Pada Pemilih Pemula di Kelurahan Indro Kabupaten Gresik, Universitas Brawijaya, Malang.

Sumber Lain:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Badan Pusat Statistik Kota Manado Kecamatan Sario Tahun 2021. <https://manadokota.bps.go.id/publication/2021/09/24/3282158b01636160defc07be/kecamatan-sario-dalam-angka-2021.html>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.